

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, S. (2008). Pengertian fasilitas belajar dan jenisnya. Diperoleh dari (<http://sobatbaru.blogspot.com/2008/10/pengertian-fasilitas-belajar.html>)
- Badan Pusat Statistik. (2023). Kecamatan Balige Dalam Angka 2023. Toba Samosir:
- Badan Pusat Statistik. Badan Standardisasi Nasional. (2004). SNI 03-1733-2004. Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan.
- Bintarto, S. (1991). Dasar-dasar ilmu geografi. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Chrastaller, W. (1966). *Central places in Southern Germany*. Prentice-Hall.
- Departemen Kesehatan RI. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Departemen Kesehatan. (2009). Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Depdiknas. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Dewanti, S. (2021). Analisis aksesibilitas dalam penentuan lokasi penelitian: Studi kasus dan implikasi. Bandung: Penerbit Ilmu Pengetahuan.
- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumut. (<https://Sidukcapil.Tobakab.Go.Id/PencatatanSipil/KepemilikanAkta-pencatatan-Sipil>. diakses September 2023)
- Frick, H. (1984). Rumah sederhana. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Ghani, S. A., & Rahmi, L. (2024). Pemetaan sebaran dan analisis jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan menggunakan GIS di Kecamatan Rengat Barat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 19371-19382.
- Hastuti, E. (2011). Kajian perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) perumahan sebagai bahan revisi SNI 03-1733-2004. *Jurnal Standardisasi*, 13(1), 36- 44.
- Indah, N. (2020). Analisis ketersediaan fasilitas pelayanan sosial dengan jumlah penduduk di Kota Binjai. *Skripsi*.
- Kementerian Riset dan Teknologi. (2013). Panduan penelitian geografi dan spasial. Jakarta: Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
- Lestari, D. (2019). Peran infrastruktur dalam meningkatkan aksesibilitas sarana pendidikan dan kesehatan. Yogyakarta: Penerbit Abadi.
- Marwoto, T. (2019). Distribusi sarana pendidikan dan kesehatan: Tantangan pembangunan di daerah terpencil. Yogyakarta: Penerbit Maju Sejahtera.
- Marzuki, A. (2020). Keberlanjutan dan pemeliharaan sarana kesehatan: Perspektif pembangunan berkelanjutan. Jakarta: Pustaka Medika.

- Moenir, S. (2006). Manajemen pelayanan umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pasaribu, N. R. (2016). Analisis ketersediaan sarana kesehatan dan sarana pendidikan di Kabupaten Karo. Skripsi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018. Tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014. Tentang pusat kesehatan masyarakat.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 75 Tahun 2014. Tentang fasilitas pelayanan kesehatan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007. Tentang standar sarana.
- Peraturan Dinas Kesehatan SK Menkes Nomor 81/Menkes/SK/I/2004. Tentang indikator rasio tenaga kesehatan.
- Permendiknas No. 24 Tahun 2007. Tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.
- Pranowo, D., et al. (2023). *Analisis ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah pedesaan*. Jurnal Geografi Terapan, 15(2), 45-60.
- Rahmat, A. (2020). Efisiensi sumber daya dalam ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan. Jakarta: Pustaka Pendidikan.
- Riyadi, A. (2016). Kecukupan sarana kesehatan: Faktor penting dalam peningkatan akses layanan. Jakarta: Penerbit Sehat Nusantara.
- Samsir, (2012). Kajian ketersediaan sarana sosial ekonomi perkotaan dalam menunjang pengembangan ibu kota Kabupaten Kolaka Utara. Tesis, Program Pascasarjana Program Studi Manajemen Perkotaan, Universitas Sulawesi Selatan.
- Sapakoly, H., & Papilaya, R. (2023). *Evaluasi aksesibilitas fasilitas pendidikan dan kesehatan dengan metode buffering*. Jurnal Sistem Informasi Geografis, 12(1), 78-92.
- Setiawan, B. (2018). Penyebaran fasilitas kesehatan dan kesenjangan akses di berbagai daerah. Surabaya: Penerbit Kesehatan Indonesia.
- SK Menkes Nomor 81/Menkes/SK/I/2004 tentang Standar Pelayanan Kesehatan.
- Slamet, H. (2018). Standar kecukupan sarana pendidikan untuk pembelajaran berkualitas. Bandung: Penerbit Cendekia.
- Sudjana, I. (2018). Pentingnya ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan manusia. Bandung: Penerbit Nusantara.
- Tarigan, H. (2006). Aksesibilitas dalam penelitian geografi. Medan: Penerbit Geografi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999. (1999). Tentang pemerintahan daerah. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009. (2009). Tentang kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Yulianti, R. (2020). Pemerataan akses pendidikan: Tantangan dan solusi di daerah terpencil. Semarang: Penerbit Pendidikan Mandiri.
- Yunus, H. S. (2008). Struktur Tata Ruang Kota. Pustaka Pelajar.



THE
Character Building
UNIVERSITY